

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi penggunaan alat pembayaran negara non tunai yaitu Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan *Cash Management System Virtual Account (CMS VA)* pada Satker Pusbangkom Manajemen BPSDM Kementerian PUPR telah berjalan sejak Tahun 2019 hingga saat ini, namun diketahui dari hasil penelitian bahwa realisasi penggunaannya masih sangat rendah yaitu hanya mencapai 2% dari pagu DIPA dikarenakan penggunaan uang tunai masih tinggi.
2. Belum optimalnya penggunaan KKP dan CMS VA disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, diantaranya yaitu :
 - a. Faktor Internal :
 - 1) Kurangnya Komitmen Pimpinan terkait penggunaan KKP dan CMS VA;
 - 2) Kurangnya kompetensi SDM;
 - 3) Kurangnya fasilitasi peningkatan kompetensi SDM dalam penggunaan KKP dan CMS VA;
 - 4) Tidak adanya SOP tata cara penggunaan KKP dan CMS VA
 - b. Faktor Eksternal :
 - 1) Adanya biaya tambahan *Surcharge* dari *merchant* / toko penyedia atas transaksi KKP dan CMS VA;
 - 2) Adanya persyaratan rekening bank untuk pembayaran CMS VA;
 - 3) Kurangnya pendampingan dari pihak Bank (PIC CMS VA);
 - 4) Belum adanya sistem punishment dari pembuat regulasi (BUN);
- 3) Langkah-langkah strategi sebagai upaya optimalisasi penggunaan KKP dan CMS VA, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pendataan Ulang KKP;
 - b. Penetapan Target Pemakaian KKP dan CMS VA;
 - c. Penyusunan SOP dan Nota Dinas KKP dan CMS VA;
 - d. Penguatan SDM;
 - e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka sebagai output atau tujuan dari penelitian ini, direkomendasikan beberapa saran kepada Pimpinan Pusbangkom Manajemen agar upaya optimalisasi pemakaian KKP dan CMS VA sebagai alat pembayaran belanja negara dalam rangka mewujudkan budaya *cashless* serta meminimalisir temuan audit dapat tercapai, yaitu :

1. Merekomendasikan kepada pimpinan satker agar segera melakukan tindak lanjut atas permasalahan implementasi KKP dan CMS VA yang dihadapi, yaitu dengan menerbitkan SOP serta menetapkan target penggunaan setiap bulannya untuk meningkatkan realisasinya.
2. Berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penggunaan KKP dan CMS VA, merekomendasikan agar pimpinan dapat memanfaatkan kekuatan serta peluang yang dimiliki oleh satker untuk mengurangi faktor penghambat yaitu berkomitmen meningkatkan pengawasan, menjalankan SOP, rutin berkoordinasi baik secara internal dengan para pegawai dan secara eksternal dengan stake holder seperti KPPN dan Pihak Bank, serta menjadwalkan kegiatan pelatihan untuk SDM internal untuk meningkatkan pemahaman terkait KKP dan CMS VA.
3. Merekomendasikan agar pimpinan segera melaksanakan langkah strategi yang disusun dalam penelitian ini untuk mewujudkan optimalisasi penggunaan KKP dan CMS VA yaitu :
 - a) Pendataan Ulang Pemegang KKP dan CMS VA dalam waktu satu minggu;
 - b) Penetapan Target Penggunaan, minimal penggunaan 50% dalam sebulan;
 - c) Penerbitan SOP dan Nota Dinas, yaitu dalam semester pertama TA. 2023 SOP ataupun Nota dinas telah ditetapkan, dan didistribusikan;
 - d) Penguatan SDM, diantaranya pemberian sosialisasi SOP, fasilitasi pengembangan kompetensi bidang keuangan yang dijadwalkan dalam setahun dapat memenuhi 20 JP diklat per pegawai;
 - e) Melakukan Monev secara berkala, pembuatan laporan monev internal bulanan dan eksternal secara triwulanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Pancar Siwah.
- Alwi, H. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Daly, J., & Buehner, M. (2003). P-card utilization in municipal government: advantages and concerns. *Journal of Public Procurement*, 3. <https://doi.org/10.1108/JOPP-03-01-2003-B004>
- Danial, & Warsiah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc.
- Galuh, A., & Santoso, F. I. (2022). Implementasi Cash Management System (CMS) dalam belanja daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. *National Conference on Accounting & Finance*.
- Goldworthy, & Ashley. (1998). *Australian Public Affairs Information Service*. APAIS.
- Grant, R. M. (1999). *Analisis Strategi Kontemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi* (2nd ed.). Erlangga.
- Huda, M. (2015). Implementasi Kebijakan Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Politika*, 1(1).
- Jauch, L. R., & Glueck, W. F. (2000). *Manajemen Dan Strategis Kebijakan Perusahaan*. Erlangga.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
- Kurniadi, R. M., & Syarif, R. (2022). Tinjauan Atas Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Pada Satuan Kerja Di

Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(1). <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i1.1352>

- Kurniati, P., Nugroho, B., & Saragih, F. (2019). Implementation of the Government Credit Card Policy in the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. *Proceedings of the Proceedings of the 1st Asian Conference on Humanities, Industry, and Technology for Society, ACHITS 2019, 30-31 July 2019, Surabaya, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-7-2019.2287577>
- Liyanapathirana, T., & Ranjani, C. (2017). Cash Management System and Suggestions for Policy Formulation for E-Cash Management System In Sri Lanka. *Journal of Economics and Management Sciences*, 8, 75–81.
- Marrus. (2002). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Rajawali Press.
- Maulid, L. C., & Sudiby, Y. A. (2020). Kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di indonesia: permasalahan dan solusi. *AKUNTABEL*, 17(2).
- Ming-Yen Teoh, W., Choy Chong, S., Lin, B., & Wei Chua, J. (2013). Factors affecting consumers' perception of electronic payment: an empirical analysis. *Internet Research*, 23(4), 465–485. <https://doi.org/10.1108/IntR-09-2012-0199>
- Moleong, Lexy. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Muwaffaq, F. A., & Ahmadi, M. H. (2022). Pelaksanaan Restrukturisasi dan Pendebitan Rekening Pengeluaran Kas Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri. *Jurnal Info Artha*, 6(1).
- Novitasari, T., & Halim, A. (2020). Analisis Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Magelang). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2).
- Nota Dinas DJPB Kementerian Keuangan No. ND-2/PB.2/2022 Perihal Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Dalam Rangka Pencapaian Target Transaksi KKP dan Akselerasi Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran (2022)

- Nugent, S. (2010). The Asset Journal, Management Council Inc. *Journal of Management Asset*, 4.
- Nurrohman, B. (2017). Optimalisasi Pelayanan E-KTP Guna Meningkatkan Validitas Data Kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 10(6).
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Peraturan Kepala LKPP No.14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*
- PMK Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
- PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satker Pengelola APBN, (2016).
- PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Pub. L. No. 196 (2018).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan rekening Pengeluaran Milik K/L, Pub. L. No. 183 (2019).
- PMK Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang tata cara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, (2019).
- PMK Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, (2021).
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Pub. L. No. 15 (2015).
- Peraturan Menteri PUPR Nomor : 13/PRT/M/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Pub. L. No. 13 (2020).
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pub. L. No. 45 (2013).
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pub. L. No. 15 (2015).
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pratama, A. R. (2013). *Optimalisasi Keselamatan Crew Kapal dalam Proses Kerja Jangkar di AHTS Amber*. Politeknik Ilmu Pelayaran.
- Quinn, R. E. (1990). *Becoming A Master Manager, A Competency Framework*. John Wiley & Sons.
- Rangkuti, Freddy. (2008). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, I. (2020). Analisis Penerapan Cash Management System Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pik Pulogadung. *Jurnal Perspektif*, 18(1), 1–8. <https://doi.org/10.31294/jp.v18i1.6699>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah Disampaikan Acara Orasi Ilmiah*. Bandung, 10.
- Siringoringo, H. (2005). *Seri Teknik Riset Operasional: Pemrograman Linear*. Graha Ilmu.
- Sriyani, S., Samudra, I. K. B., & Syahputra, B. D. A. (2022). IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 3(1), 70–85. <https://doi.org/10.33050/jmari.v3i1.2166>
- Subari, S., & Ascarya, A. (2003). *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Sosiologi Pemerintahan*. Ghalia Indonesia.
- Sutaryono. (2015). Tantangan Kelembagaan dalam Implementasi Kebijakan Penataan Ruang. *Makalah Pada Seminar Nasional Tata Ruang Dan Sustainable Planning & Culture*, 2.

Sutrisno. (2004). *An Investigation of Participation Project Appraisal in Developing Countries Using Elements of Value an Risk Management* (Vol. 1). University of Manchester Institute.

Syafiie, I. K. (2020). *Ilmu Administrasi Publik*. PT Rineka Cipta.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT. Pustaka Indonesia Press.

Tommasi, D. (2013). *The Budget Execution Process* (pp. 285–311).
https://doi.org/10.1057/9781137315304_14

Undang Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, (2004).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2003).

Winardi. (1999). *Pengantar Tentang Teori Sistem Dan Analisis Sistem*. Mandar Maju.

Zulfadrial. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Yuma Pustaka.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A
J A K A R T A